



**RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2020**



**BADAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA PEKALONGAN  
Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan Telp. 0285 – 429451**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 16 September 2019

Kepala BKD Kota Pekalongan,



**Drs. R Doyo Budi W, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19631111 198902 1 005

## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II EVALUASI RENJA BKD KOTA PKL TAHUN 2018 .....</b>	<b>7</b>
2.1 Hasil Evaluasi Terhadap Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Renja BKD Kota Pekalongan Tahun 2018.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	13
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	13
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>18</b>
3.1 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota.....	18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKD.....	20
3.3 Program dan Kegiatan .....	21
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>24</b>
4.1. Rencana Kerja .....	24
4.2. Pendanaan Perangkat Daerah .....	28
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>35</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perumusan rancangan awal Renja merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada OPD dalam menyusun Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 teknokratis dan partisipatif. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai kertas kerja (*working paper*). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RKPD merupakan dokumen yang tak terpisahkan dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen).

Rencana Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020 merupakan Dokumen Rencana dengan wawasan satu tahun ke depan yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) harus memperhatikan seluruh perubahan sosial, politik, dan ekonomi serta menjadikan hasil evaluasi perencanaan tahun sebelumnya sebagai referensi.

Badan Keuangan Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan tahunan pemerintah daerah, sehingga dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan yang berisikan Program dan Kegiatan yang disusun lebih menekankan kepada Pengelolaan Keuangan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2020, tentunya program dan kegiatan tersebut mendukung pelaksanaan prioritas kinerja pembangunan Kota Pekalongan yang mengusung visi Kota Pekalongan yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”. Peran serta Badan Keuangan Daerah dalam misi dimaksud adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif berkualitas transparan dan akuntabel pemerintahan yang akuntabel berbasis teknologi informasi.

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah terwujud sebagai manifestasi daripada materi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah dijabarkan di dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yaitu di dalam Prioritas Kinerja Pembangunan Kota Pekalongan Urusan

Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan maupun Perubahan Kedua Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Disamping itu, RENJA yang disusun ini telah disinkronisasi dengan acuan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja K/L), Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pekalongan Tahun 2020.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik” sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya;

25. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Pekalongan Tahun 2004-2013;
26. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
27. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
28. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 9);
30. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 43).

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

#### **A. Maksud**

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai pedoman atau acuan bagi pihak-pihak kepentingan baik internal maupun eksternal lingkup kedinasan maupun tingkat Kota Pekalongan dan merupakan penjabaran dari implementasi pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun yang akan datang di dalam Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dalam menciptakan kesepakatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Kota Pekoangan 2016-2021. Serta sebagaian acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2020.

#### **B. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



1. Menyusun program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2020;
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dengan pembandingan Renja Tahun sebelumnya maupun Tahun yang akan datang;
4. Pedoman dalam menyusun dokumen rencana agenda pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Tahun 2020;
5. Penetapan Pelaksanaan Program Kegiatan Badan Keuangan Dearah Kota Pekalongan yang direncanakan dalam pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun 2020.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**BAB 1 PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD yang berisi latar belakang penyusunan rencana kerja, landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan rencana kerja, penjelasan mengenai maksud dan tujuan, serta sistematika bahasa tiap bab dalam Renja PD.

**BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**, berisikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun lalu, analisis kinerja pelayanan PD, review terhadap rancangan awal RKPD.

**BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PD**, berisikan tentang Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota dan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

**BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**, berisikan rencana kerja kegiatan, capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra PD dan pagu program dan kegiatan.

**BAB 5 PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA BKD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018**

#### **2.1 Hasil Evaluasi Terhadap Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Renja BKD Kota Pekalongan Tahun 2018**

Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2018 melaksanakan 1 urusan 6 program dengan 67 kegiatan, dengan capaian realisasi target kinerja output kegiatan dan capaian realisasi keuangan tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Outcome Program Renja BKD serta Realisasi Anggaran Kota Pekalongan Tahun 2018**

Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Keuangan			Kinerja			Kinerja			Keterangan
	Anggaran	Realisasi	%	Target			Realisasi			
				Keluaran (Output)	Target	Satuan	Kinerja	Satuan	%	
BADAN KEUANGAN DAERAH										
URUSAN PENUNJANG										
KEUANGAN										
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.288.500.000	2.067.478.649	90,34%	Persentase pelaksanaan surat-menyerurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi	100	persen	100	persen	100%	
Penyediaan jasa surat menyerurat	3.000.000	2.334.700	77,82%	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyerurat	12	bulan	12	bulan	100%	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	513.000.000	400.174.905	78,01%	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	12	bulan	100%	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	103.000.000	103.000.000	100,00%	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	bulan	12	bulan	100%	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	105.000.000	84.000.000	80,00%	jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	bulan	12	bulan	100%	
Penyediaan alat tulis kantor	210.000.000	195.043.900	92,88%	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12	bulan	12	bulan	100%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	80.000.000	79.750.000	99,69%	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	12	bulan	100%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	9.377.500	93,78%	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	12	bulan	100%	
Penyediaan peralatan rumah tangga	22.000.000	20.599.500	93,63%	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	bulan	12	bulan	100%	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000	1.920.000	76,80%	jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	12	bulan	100%	
Penyediaan makanan dan minuman	120.000.000	111.135.842	92,61%	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	bulan	12	bulan	100%	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	950.000.000	897.082.302	94,43%	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	350	orang/kali	498	orang/kali	142%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan	170.000.000	163.060.000	95,92%	jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan	12	bulan	12	bulan	100%	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.026.500.000	2.578.343.887	85,19%	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	100	persen	100	persen	100%	
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4	1.125.000.000	851.808.950	75,72%	jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan	5	unit	5	unit	100%	

Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Keuangan			Kinerja			Kinerja			Keterangan
	Anggaran	Realisasi	%	Target			Realisasi			
				Keluaran (Output)	Target	Satuan	Kinerja	Satuan	%	
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2	364.500.000	342.787.000	94,04%	jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang diadakan	20	unit	20	unit	100%	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	300.000.000	271.874.620	90,62%	jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1	unit	1	unit	100%	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	151.000.000	108.382.840	71,78%	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	49	unit	49	unit	100%	
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	385.000.000	370.815.000	96,32%	Jumlah rumah dinas yang terehabilitasi sedang/berat	1	unit	1	unit	100%	
Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	40.000.000	29.742.357	74,36%	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi	3	unit	3	unit	100%	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	85.000.000	61.073.400	71,85%	Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terehabilitasi secara rutin/berkala	1	unit	1	unit	100%	
Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	190.000.000	188.574.000	99,25%	Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang/berat	1	unit	1	unit	100%	
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	336.000.000	324.750.720	96,65%	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	39	unit	53	unit	136%	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	50.000.000	28.535.000	57,07%	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	bulan	12	bulan	100%	
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	150.000.000	144.014.580	96,01%	Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja	100	persen	100	persen	100%	
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	120.000.000	119.028.000	99,19%	Jumlah laporan prognosis dan realisasi anggaran yang disusun	14	laporan	14	laporan	100%	
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	10.000.000	7.364.000	73,64%	Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun	14	dokumen	14	dokumen	100%	
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000	9.097.580	90,98%	Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun	6	dokumen	6	dokumen	100%	
Penyusunan Profil Perangkat Daerah	10.000.000	8.525.000	85,25%	Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun	1	dokumen	1	dokumen	100%	
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT (PPM)	46.007.000	45.514.000	98,93%	Persentase pengaduan	0	persen	0	persen	100%	
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	26.007.000	26.004.000	99,99%	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	12	orang/bulan	12	orang/bulan	100%	
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	20.000.000	19.510.000	97,55%	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik	3	kali	3	kali	100%	
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.822.200.000	3.460.272.285	90,53%	Ketersediaan dokumen APBD yang tepat waktu	6	dokumen	6	dokumen	100%	

Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Keuangan			Kinerja			Kinerja			Keterangan
	Anggaran	Realisasi	%	Target			Realisasi			
				Keluaran (Output)	Target	Satuan	Kinerja	Satuan	%	
				Persentase PD termonitor dalam pelaporan keuangan	100	persen	100	persen	100%	
				Persentase PD menjadi bagian dalam rekonsiliasi aset dan keuangan setiap semester	100	persen	50	persen	50%	
Penyusunan standar satuan harga	100.000.000	89.810.000	89,81%	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun	2	dokumen	2	dokumen	100%	
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	62.000.000	60.137.400	97,00%	Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun	1	sisdur	1	sisdur	100%	
Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD	302.100.000	281.730.175	93,26%	Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD	2	dokumen	2	dokumen	100%	
				Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD	4	dokumen	4	dokumen	100%	
Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	242.100.000	238.686.225	98,59%	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	2	dokumen	2	dokumen	100%	
				Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalonganyang disusun	4	dokumen	4	orang	100%	
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	50.000.000	43.342.300	86,68%	Jumlah pejabat penatausahaan yang meningkat pengetahuannya tentang pengelolaan keuda	300	orang	300	orang	100%	
Peningkatan manajemen aset/barang daerah	805.000.000,00	687.046.750	85,35%	Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	31	OPD	58	OPD	187%	
				Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	36	Unit Kerja	72	Unit Kerja	200%	
				Jumlah laporan/data pengelolaan BMD	67	laporan	134	laporan	200%	
				Jumlah pelaksanaan Sensus BMD	1	kali	1	kali	100%	
Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	100.000.000	60.966.400	60,97%	Jumlah jenis BMD yang akan dihapus	3	jenis	3	jenis	100%	
Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	150.000.000	132.814.785	88,54%	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel	12	bulan	12	bulan	100%	
Fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	160.000.000	147.840.135	92,40%	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	12	bulan	12	bulan	100%	
Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	244.000.000	242.073.400	99,21%	Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak	67	PD/Unit Kerja	67	PD/Unit Kerja	100%	
Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	50.000.000	46.780.000	93,56%	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	2	buku	2	Buku	100%	

Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Keuangan			Kinerja			Kinerja			Keterangan
	Anggaran	Realisasi	%	Target			Realisasi			
				Keluaran (Output)	Target	Satuan	Kinerja	Satuan	%	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	65.000.000	63.840.000	98,22%	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	12	bulan	12	bulan	100%	
Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	105.000.000	100.904.435	96,10%	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah	2	kali	2	kali	100%	
Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	175.000.000	171.319.600	97,90%	Jumlah sistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksanakan	67	PD/Unit Kerja	67	PD/Unit Kerja	100%	
Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	20.000.000	16.425.000	82,13%	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan	3200	data	3200	data	100%	
Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	50.000.000	47.290.600	94,58%	Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan	12	bulan	12	bulan	100%	
				Jumlah koordinasi perencanaan anggaran	6	kali	6	kali	100%	
Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	375.000.000	366.976.100	97,86%	Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun	2	dokumen	2	dokumen	100%	
Fasilitasi MP TP-TGR	42.000.000	39.453.200	93,94%	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR	12	bulan	12	bulan	100%	
Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	300.000.000	215.814.080	71,94%	Jumlah Berkas Pengajuan Pembuatan Sertikat Tanah	40	Berkas	139	bidang	348%	
				Jumlah Papan Nama Aset	70	buah	70	buah	100%	
				Jumlah Patok Batas Tanah	600	buah	600	buah	100%	
Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	75.000.000	71.660.000	95,55%	Terupdatenya data gaji dan tercetaknya daftar gaji PNS se Kota Pekalongan	12	bulan	12	bulan	100%	
Fasilitasi pelaporan DAK	67.000.000	64.927.400	96,91%	Jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK	6	bulan	6	bulan	100%	
				Jumlah laporan DAK per bidang per triwulan	4	triwulan	4	triwulan	100%	
Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	125.000.000	115.570.300	92,46%	Buku Analisa Laporan Keuangan 5 Tahun	1	Buku	1	Buku	100%	
				Buku Perkembangan APBD 5 Tahun	1	Buku	1	Buku	100%	
Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	83.000.000	80.494.000	96,98%	Laporan LO dan LRA OPD	69	Laporan	69	laporan	100%	
				Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan	14	Laporan	14	laporan	100%	

Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Keuangan			Kinerja			Kinerja			Keterangan
	Anggaran	Realisasi	%	Target			Realisasi			
				Keluaran (Output)	Target	Satuan	Kinerja	Satuan	%	
				Laporan Keuangan konsolidasi Semesteran	2	Laporan	2	Buku	100%	
Pendampingan transaksi non tunai	75.000.000	74.370.000	99,16%	Jumlah bulan pendampingan transaksi non tunai	12	bulan	12	bulan	100%	
PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	3.269.100.000	3.008.027.778	92,01%	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Milyar)	192,7	Rp. Milyar	179,2	Rp. Milyar	93%	
Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	75.000.000	69.090.000	92,12%	Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	5	kali	5	kali	100%	
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	290.000.000	285.490.000	98,44%	Jumlah pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi	50	Wajib Pajak	49	Wajib Pajak	98%	
Penetapan pajak dan retribusi daerah	136.000.000	124.289.000	91,39%	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	91500	lembar	91121	lembar	100%	
Penagihan pajak dan retribusi daerah	290.000.000	283.762.000	97,85%	Prosentase WP/WR yang tertagih	50	persen	50	persen	100%	
Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	326.000.000	312.063.000	95,72%	Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi	300	WP/WR	300	WP/WR	100%	
Pemutakhiran data PBB	820.000.000	775.693.900	94,60%	Jumlah data obyek pajak yang termutakhirkan	25500	data	23980	data	94%	
				Jumlah peta obyek PBB P2 yang termutakhirkan	14	peta	14	peta	100%	
				Jumlah Objek Pajak Khusus yang dinilai	9	objek	9	obyek	100%	
				Jumlah permohonan pelayanan PBB yang terproses dan selesai	2500	pelayanan	2762	pelayanan	110%	
Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	133.000.000	126.104.878	94,82%	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	12	laporan	12	laporan	100%	
				Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah	2	dokumen	2	dokumen	100%	
				Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan	6	kali	6	kali	100%	
Verifikasi BPHTB	85.000.000	83.350.000	98,06%	Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi	2000	peralihan	1986	peralihan	99%	
Pengembangan SIM pendapatan daerah	100.000.000	98.300.000	98,30%	Jumlah Sistem Pembayaran Host to Host ke Bank	1	buah	1	buah	100%	
Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB	345.000.000	340.873.000	98,80%	Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	86500	lembar	86500	lembar	100%	
Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	270.000.000	253.622.000	93,93%	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	12	bulan	12	bulan	100%	
Pemeriksaan pajak daerah	339.100.000	199.140.000	58,73%	Jumlah WP/WR yang diperiksa	50	WP/WR	30	WP/WR	60%	
Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	60.000.000	56.250.000	93,75%	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang terdata	2500	objek	2523	objek	101%	

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah dengan beberapa aspek/ fokus sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan dengan diperolehnya opini WTP, Penetapan Peraturan APBD yang tepat waktu dan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib administrasi.
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Kinerja BKD Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018		Target Akhir RPJMD 2021
							Target	Realisasi	
8	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan.	12 Opini BPK terhadap LKD	WDP	indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Meningkatnya pendapatan asli daerah	15 Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	152 Milyar	persen	17,34	8,46	9,76	20,61	10

## 2.3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Catatan Hasil Reviu Renja BKD Kota Pekalongan 2020 dari Inspektorat Kota Pekalongan, BKD Kota Pekalongan telah melaksanakan tindak lanjut atas saran hasil reviu dimaksud sebagai berikut dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Tindak lanjut atas saran hasil reviu Rancangan Awal Renja 2020**

Saran	Tindak Lanjut
Kepala BKD Kota Pekalongan agar dalam penyusunan Renja Tahun Anggaran 2020 untuk menyesuaikan/ menelaraskan dengan RKPD Tahun 2020 terkait adanya pagu indikatif pada Renja 2020 dengan RKPD Tahun 2020.	Kegiatan-kegiatan yang pagu indikatifnya belum sesuai dengan RKPD 2020, telah dilakukan penyesuaian dengan RKPD Tahun 2020 dan langsung di input pada aplikasi new-simral 2020 pada tanggal 21 s/d 23 Agustus 2019.



<b>Saran</b>	<b>Tindak Lanjut</b>
Rancangan akhir Renja BKD Tahun 2020 (narasi) belum disusun.	BKD Kota Pekalongan telah menyusun narasi rancangan akhir Renja BKD Tahun 2020 tetapi sampai dengan saat ini masih dalam tahap penyempurnaan, sambil menunggu salinan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

**Tabel 2.4**  
**Perbandingan Pagu Program dan Kegiatan RKPD dengan Renja**

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RKPD 2020</b>	<b>RENJA 2020</b>
		<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>30</b>	<b>URUSAN PENUNJANG</b>	14.878.683.000,00	14.878.683.000,00
<b>3002</b>	<b>KEUANGAN</b>	1.793.000.000,00	1.793.000.000,00
<b>300201</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.793.000.000,00	1.793.000.000,00
300201001	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00
300201002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	514.200.000,00	514.200.000,00
300201007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	103.000.000,00	103.000.000,00
300201008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	105.000.000,00	105.000.000,00
300201010	Penyediaan alat tulis kantor	190.000.000,00	190.000.000,00
300201011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	82.300.000,00	82.300.000,00
300201012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00
300201014	Penyediaan peralatan rumah tangga	13.000.000,00	13.000.000,00
300201015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000,00	2.500.000,00
300201017	Penyediaan makanan dan minuman	120.000.000,00	120.000.000,00
300201018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	650.000.000,00	650.000.000,00
300201021	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan	0,00	0,00
<b>300202</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	781.140.000,00	781.140.000,00
300202022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	250.000.000,00	250.000.000,00
300202024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	166.140.000,00	166.140.000,00
300202042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	200.000.000,00	200.000.000,00
300202058	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	125.000.000,00	125.000.000,00
300202059	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	40.000.000,00	40.000.000,00

KODE	URAIAN	RKPD 2020	RENJA 2020
		Rp	Rp
<b>300206</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	20.000.000,00	20.000.000,00
300206005	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00
300206006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>300207</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)</b>	46.640.000,00	46.640.000,00
300207001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	31.640.000,00	31.640.000,00
300207014	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>300236</b>	<b>Program peningkatan pendapatan daerah</b>	2.166.000.000,00	2.166.000.000,00
300236002	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	439.000.000,00	439.000.000,00
300236003	Penetapan pajak dan retribusi daerah	106.000.000,00	106.000.000,00
300236006	Pemutakhiran data PBB	905.000.000,00	905.000.000,00
300236008	Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	120.000.000,00	120.000.000,00
300236011	Pengembangan SIM pendapatan daerah	150.000.000,00	150.000.000,00
300236012	Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB	386.000.000,00	386.000.000,00
300236017	Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00
<b>300237</b>	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah</b>	6.339.653.000,00	6.339.653.000,00
300237001	Penyusunan standar satuan harga	100.000.000,00	100.000.000,00
300237002	Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	50.000.000,00	50.000.000,00
300237003	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00
300237004	Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	300.000.000,00	300.000.000,00
300237005	Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	70.000.000,00	70.000.000,00
300237006	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	620.000.000,00	620.000.000,00
300237007	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	100.000.000,00	100.000.000,00
300237008	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah	3.274.253.000,00	3.274.253.000,00
300237009	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah	1.370.400.000,00	1.370.400.000,00
300237010	Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	350.000.000,00	350.000.000,00
300237011	Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah	30.000.000,00	30.000.000,00

KODE	URAIAN	RKPD 2020	RENJA 2020
		Rp	Rp
<b>300238</b>	<b>Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos</b>	1.169.000.000,00	1.169.000.000,00
300238001	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD	358.000.000,00	358.000.000,00
300238002	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	286.000.000,00	286.000.000,00
300238003	Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	160.000.000,00	160.000.000,00
300238004	Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	105.000.000,00	105.000.000,00
300238005	Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	210.000.000,00	210.000.000,00
300238006	Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>300239</b>	<b>Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan</b>	759.600.000,00	759.600.000,00
300239001	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	100.000.000,00	100.000.000,00
300239002	Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	50.000.000,00	50.000.000,00
300239003	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	159.600.000,00	159.600.000,00
300239004	Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	100.000.000,00	100.000.000,00
300239005	Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	350.000.000,00	350.000.000,00
<b>300240</b>	<b>Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah</b>	1.073.000.000,00	1.073.000.000,00
300240001	Penagihan pajak dan retribusi daerah	245.000.000,00	245.000.000,00
300240002	Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	260.000.000,00	260.000.000,00
300240003	Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	180.000.000,00	180.000.000,00
300240004	Verifikasi BPHTB	100.000.000,00	100.000.000,00
300240005	Pemeriksaan pajak daerah	210.000.000,00	210.000.000,00
300240006	Gebyar Pajak Daerah	78.000.000,00	78.000.000,00
<b>300241</b>	<b>Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah</b>	730.650.000,00	730.650.000,00
300241001	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	65.000.000,00	65.000.000,00
300241002	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00
300241003	Fasilitasi MP TP-TGR	50.000.000,00	50.000.000,00
300241004	Fasilitasi pelaporan DAK	66.650.000,00	66.650.000,00

KODE	URAIAN	RKPD 2020	RENJA 2020
		Rp	Rp
300241005	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	50.000.000,00	50.000.000,00
300241006	Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	20.000.000,00	20.000.000,00
300241007	Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	70.000.000,00	70.000.000,00
300241008	Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	244.000.000,00	244.000.000,00
300241009	Pendampingan transaksi non tunai	90.000.000,00	90.000.000,00
<b>T O T A L</b>		<b>14.878.683.000,00</b>	<b>14.878.683.000,00</b>

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**BKD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020**

**3.1 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota**

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan terpilih periode 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”**, dengan Misi :

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas;
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah.

Telaahan terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung BKD Kota Pekalongan, ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-2 yaitu : “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”. Peran serta BKD dalam misi dimaksud adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif berkualitas transparan dan akuntabel transparan pemerintahan yang akuntabel berbasis teknologi informasi.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Strategi**  
**BKD Kota Pekalongan Tahun 2020**

<b>MISI/TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Sebesar-Besarnya Bagi Kesejahteraan Masyarakat		
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Meningkatnya professional ASN	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, kualitas perencanaan, pengawasan, pengelolaan keuangan daerah dan profesionalitas ASN
	Meningkatnya kualitas layanan publik	Peningkatan sistem pelayanan public dan Penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi

**Tabel 3.2**  
**Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah**  
**BKD Kota Pekalongan Tahun 2020**

<b>PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD</b>		<b>PROGRAM PRORITAS RPJMD</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB</b>
	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET TAHUN 2020</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
9. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada :				
Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah terintegrasi berbasis kinerja, serta peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Opini BPK atas LKD	WTP	Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	BKD
			Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	
			Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKD

Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai, tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan BKD Kota Pekalongan. Tujuan jangka menengah BKD Kota Pekalongan adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah;
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh BKD Kota Pekalongan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategi BKD Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik

**Tabel 3.3**  
**Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja BKD**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja 2020
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah		Opini BPK atas LKD	WTP
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	Pelaporan Keuangan Daerah berkualitas	100%
2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah		Kemandirian Daerah (Kontribusi PAD terhadap Pendapatan)	21%
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	% Peningkatan PAD	10%
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Nilai Evaluasi LKjIP (SAKIP) BKD 2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	1. BB 2.475

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  1. Penyediaan jasa surat menyurat
  2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  5. Penyediaan alat tulis kantor
  6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
  8. Penyediaan peralatan rumah tangga
  9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  10. Penyediaan makanan dan minuman
  11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
  4. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
  5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  1. Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
  2. Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
- d. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
  1. Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
  2. Promosi kegiatan unggulan dan inovatif
- e. Program Peningkatan Pendapatan Daerah
  1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
  2. Penetapan pajak dan retribusi daerah
  3. Pemutakhiran data PBB



4. Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah
5. Pengembangan SIM pendapatan daerah
6. Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB
7. Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah
- f. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
  1. Penyusunan standar satuan harga
  2. Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah
  3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya
  4. Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah
  5. Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok
  6. Peningkatan manajemen aset/barang daerah
  7. Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
  8. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah
  9. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah
  - 10.Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya
  - 11.Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah
- g. Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos
  1. Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD
  2. Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD
  3. Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan social
  4. Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
  5. Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  6. Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran
- h. Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan
  1. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
  2. Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah
  3. Pendampingan pengelolaan keuangan daerah
  4. Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi
  5. Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

- i. Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah
  - 1. Penagihan pajak dan retribusi daerah
  - 2. Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah
  - 3. Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah
  - 4. Verifikasi BPHTB
  - 5. Pemeriksaan pajak daerah
  - 6. Gebyar Pajak Daerah
- j. Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah
  - 1. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
  - 2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 3. Fasilitasi MP TP-TGR
  - 4. Fasilitasi pelaporan DAK
  - 5. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
  - 6. Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS
  - 7. Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji
  - 8. Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD
  - 9. Pendampingan transaksi non tunai

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

### 4.1. Rencana Kerja

Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan menetapkan sasaran di RPJMD yang ingin dicapai/diwujudkan sesuai dengan program kerja/ rencana kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, yaitu

1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik.

Dengan sasaran tersebut dijabarkan menjadi 4 (empat) indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, yaitu:

1. Pelaporan keuangan daerah berkualitas
2. Persentase peningkatan PAD
3. Nilai evaluasi LKjIP (SAKIP) BKD dan nilai keterbukaan informasi publik

Dari 3 (empat) indikator kinerja utama tersebut untuk tahun 2020 dapat dijabarkan kedalam beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, di antaranya sebagai berikut:

**Tabel 4.1  
Tabel IKU, Program dan Kegiatan**

No	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	<b>Pelaporan keuangan daerah berkualitas</b>	<b>Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos</b>	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD
			Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD
			Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial
			Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
			Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

		Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran
	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah</b>	Penyusunan standar satuan harga
		Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya
		Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah
		Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok
		Peningkatan manajemen aset/barang daerah
		Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah
		Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya
		Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah
		<b>Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan</b>
	Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	
	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	
	Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	
	Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	
	<b>Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah</b>	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
		Fasilitasi MP TP-TGR
		Fasilitasi pelaporan DAK

			Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
			Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS
			Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji
			Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD
			Pendampingan transaksi non tunai
		<b>Program peningkatan pendapatan daerah</b>	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
			Penetapan pajak dan retribusi daerah
			Pemutakhiran data PBB
			Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah
			Pengembangan SIM pendapatan daerah
			Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB
			Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah
<b>2</b>	<b>Persentase peningkatan PAD</b>	<b>Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah</b>	Penagihan pajak dan retribusi daerah
			Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah
			Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah
			Verifikasi BPHTB
			Pemeriksaan pajak daerah
			Gebyar Pajak Daerah
<b>3</b>	<b>Nilai evaluasi LKjIP (SAKIP) BKD dan nilai keterbukaan informasi publik</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
			Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
			Penyusunan Profil Perangkat Daerah
		<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)</b>	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif

Pencapaian sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator kinerja dan target kinerja. Target capaian kinerja di tahun ke-5 direncanakan dalam Perubahan Renstra BKD 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Target Kinerja Sasaran Tahun 2020**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	Pelaporan Keuangan Daerah berkualitas	100%
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	% Peningkatan PAD	10%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Nilai Evaluasi LKjIP (SAKIP) BKD 2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	1. BB 2. 475

Pengukuran keberhasilan dari capaian indikator kinerja di atas, dapat di gambarkan dengan keberhasilan pada pencapaian setiap sasaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Pendapatan Daerah**

Fokus kegiatan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, penetapan pajak dan restribusi daerah, penertiban dan penyampain SPPT PBB, pendataan objek pajak dan restribusi daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2020 yaitu Persentase Peningkatan potensi pendapatan sebesar 4%.

**b. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah**

Fokus kegiatan adalah fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah, peningkatan manajemen aset/barang daerah dalam rangka mendukung target indikator tahun 2020 yaitu persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot sebesar 63%, Presentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap sebesar 100%, Persentase OPD yang menyesuaikan laporan Persediaan sebesar 100%.

**c. Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos**

Fokus kegiatan adalah Penyusunan Raperda tentang APBD dan Perubahan APBD, penyusunan Raperwal tentang penjabaran APBD dan Perubahan APBD, fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka mendukung target indikator tahun 2020 yaitu Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu sebesar 100%, Presentase Penyaluran Hibah dan Bansos sebesar 100%.

**d. Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan**

Fokus kegiatan adalah penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran, dan pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi dalam rangka mendukung target indikator tahun 2020 yaitu Presentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP sebesar 100%.

**e. Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah**

Fokus kegiatan adalah penagihan pajak dan restribusi daerah, pengembangan dan penyuluhan pajak dan restribusi daerah, dan pemeriksaan pajak daerah pemeriksaan pajak daerah dalam rangka mendukung target indikator 2020 yaitu Presentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak sebesar 100%, Presentase Pencapaian Target Pendapatan Restribusi sebesar 100%.

**f. Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah**

Fokus kegiatan adalah pengendalian dan penertiban dokumen penatausahaan keuangan SKPKD dalam rangka mendukung target indikator tahun 2020 yaitu Persentase Penertiban SP2D atas pengajuan SPM dari OPD sebesar 100% Persentase Pencairan SP2D atas penertiban SP2D sebesar 100%.

**4.2. Pendanaan Perangkat Daerah**

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja di butuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegoatan prioritas di Badan Keuangan Daerah tahun 2020. Kebutuhan pendanaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan untuk tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Daftar Kegiatan dan Pagu Anggaran**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Renja 2020		
			K	Satuan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
3002	KEUANGAN				11.404.513.000,00
3002.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.975.000.000,00
3002.300201.00.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan pelaksanaan surat-menyurat	12	Bulan	3.000.000,00
3002.300201.00.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	514.200.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Renja 2020		
			K	Satuan	Anggaran
3002.300201.00.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	Bulan	103.000.000,00
3002.300201.00.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan jaga kantor	12	Bulan	105.000.000,00
3002.300201.00.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12	Bulan	190.000.000,00
3002.300201.00.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	82.300.000,00
3002.300201.00.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	10.000.000,00
3002.300201.00.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	Bulan	20.000.000,00
3002.300201.00.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah	12	Bulan	2.500.000,00
3002.300201.00.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11	Bulan	120.000.000,00
3002.300201.00.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Fasilitas rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	250	Kali	650.000.000,00
3002.300201.00.01.021	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan	Jumlah bulan terlaksananya penyediaan barang dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan	12	Bulan	175.000.000,00
<b>3002.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>565.000.000,00</b>
3002.300201.00.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1	unit	60.000.000,00
3002.300201.00.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	53	unit	150.000.000,00
3002.300201.00.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1	unit/lokasi/gedung	150.000.000,00
3002.300201.00.02.043	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	2	unit	20.000.000,00
3002.300201.00.02.058	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	29	unit	135.000.000,00



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Renja 2020		
			K	Satuan	Anggaran
3002.300201.00.02.059	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	bulan	50.000.000,00
<b>3002.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				<b>30.000.000,00</b>
3002.300201.00.06.005	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	6	dokumen	10.000.000,00
3002.300201.00.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan laporan- laporan keuangan SKPD yang disusun	6	dokumen	10.000.000,00
3002.300201.00.06.007	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil bidang keuangan yang disusun	1	dokumen	10.000.000,00
<b>3002.07</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)</b>				<b>49.907.000,00</b>
3002.300201.00.07.001	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	12	orang/ bulan	29.907.000,00
3002.300201.00.07.014	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik	3	kali	20.000.000,00
<b>3002.36</b>	<b>Program peningkatan pendapatan daerah</b>				<b>1.973.000.000,00</b>
3002.300201.00.36.002	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah WP/ WR yang terlayani	2.500	WP/WR	290.000.000,00
3002.300201.00.36.003	Penetapan pajak dan retribusi daerah	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	8.410	lembar	80.000.000,00
3002.300201.00.36.006	Pemutakhiran data PBB	Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate	###	data	950.000.000,00
		Jumlah Peta Digital PBB yang terupdate	13	peta	
		Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2019	4	buku	
		Jumlah Buku DHKP PBB 2019	54	buku	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Renja 2020		
			K	Satuan	Anggaran
		Jumlah Permohonan Pelayanan PBB yang terproses dan selesai	2.000	pelayanan	
3002.300201.00.36.008	Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	12	laporan	133.000.000,00
		Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah	2	buku	
		Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan	6	kali	
3002.300201.00.36.011	Pengembangan SIM pendapatan daerah	Jumlah Sistem Informasi Potensi Pajak dan Restribusi Daerah	1	buah	150.000.000,00
		Jumlah Komputer Anjungan ESPTD	2	unit	
		Jumlah TappingBox	4	unit	
3002.300201.00.36.012	Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB	Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	####	lembar	310.000.000,00
3002.300201.00.36.017	Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang Terdata	2.500	objek	60.000.000,00
		Jumlah Buku Daftar Objek Pajak	10	buku	
<b>3002.37</b>	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah</b>				<b>3.307.956.000,00</b>
3002.300201.00.37.001	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah dokumen standar harga yang disusun	2	dokumen	100.000.000,00
3002.300201.00.37.002	Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	2	buku	50.000.000,00
3002.300201.00.37.003	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang ter rehabilitasi secara rutin / berkala	3	gedung/ unit	75.000.000,00
3002.300201.00.37.004	Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	Jumlah sertifikat tanah	30	bidang	315.000.000,00
		Jumlah Papan Nama Aset	55	bidang	
		Jumlah Patok batas tanah	600	Buah	
		Jumlah Inventarisasi tanah milik Pemkot Pekalongan	900	bidang	
3002.300201.00.37.005	Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	5	kali	70.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Renja 2020		
			K	Satuan	Anggaran
3002.300201.00.37.006	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	27	unit	620.000.000,00
		Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	36	unit	
		Jumlah laporan /data pengelolaan BMD	67	buah	
3002.300201.00.37.007	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Jumlah jenis BMD yang akan dihapus	3	jenis	100.000.000,00
3002.300201.00.37.008	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 4 yang diadakan	3	unit	906.000.000,00
3002.300201.00.37.009	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 2 yang diadakan	50	unit	941.956.000,00
3002.300201.00.37.010	Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang ter rehabilitasi sedang / berat	1	unit	100.000.000,00
3002.300201.00.37.011	Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah	Jumlah mobil jabatan yang direhab	3	unit	30.000.000,00
<b>3002.38</b>	<b>Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos</b>				<b>1.088.000.000,00</b>
3002.300201.00.38.001	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD	2	dokumen	358.000.000,00
		Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD	4	dokumen	
3002.300201.00.38.002	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	2	dokumen	240.000.000,00
		Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	4	dokumen	
3002.300201.00.38.003	Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	12	bulan	160.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Renja 2020		
			K	Satuan	Anggaran
3002.300201.00.38.004	Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah publikasi/ sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah	2	kali	105.000.000,00
3002.300201.00.38.005	Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah sistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksanakan	67	PD/Unit Kerja	175.000.000,00
3002.300201.00.38.006	Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan	12	bulan	50.000.000,00
		Jumlah koordinasi perencanaan anggaran	6	kali	
<b>3002.39</b>	<b>Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan</b>				<b>710.000.000,00</b>
3002.300201.00.39.001	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis dan realisasi anggaran yang disusun	14	laporan	100.000.000,00
3002.300201.00.39.002	Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	Buku Analisa Laporan Keuangan 5 Tahun	1	Buku	65.000.000,00
3002.300201.00.39.003	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel	12	bulan	120.000.000,00
3002.300201.00.39.004	Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	Laporan LO dan LRA OPD	69	laporan	75.000.000,00
		Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan	14	laporan	
		Laporan Keuangan konsolidasi Semesteran	2	Buku	
3002.300201.00.39.005	Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun	2	dokumen	350.000.000,00
<b>3002.40</b>	<b>Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah</b>				<b>994.000.000,00</b>
3002.300201.00.40.001	Penagihan pajak dan retribusi daerah	Persentase Surat Tagihan yang Terbayar	54	Persen	230.000.000,00

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 ini disusun untuk dijadikan sebagai dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kota Pekalongan, serta dan sebagai panduan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020. Penyusunan Renja 2020 dilakukan setelah mempelajari visi, misi, dan program Pemerintah Kota Pekalongan sebagai muatan dan masukan dalam penyusunan visi, misi, strategi, kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan untuk satu tahun kedepan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan ini dapat menjadi sebagai acuan dan pedoman yang digunakan sebagai masukan dalam rangka penguatan peran serta dan partisipasi aktif dari semua stakeholders yang terkait didalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah serta menjadi dasar dan bahan untuk melakukan evaluasi dan guna penyusunan laporan pelaksanaan kinerja PD tahunan maupun lima tahunan.

Dengan demikian, diharapkan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah Kota Pekalongan di tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 ini masih memerlukan penyempurnaan dan saran dari semua pihak untuk perbaikannya.

Pekalongan, 16 September 2019  
Kepala BKD Kota Pekalongan,

**Drs. R Doyo Budi W, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631111 198902 1 005

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Renja 2020		
			K	Satuan	Anggaran
3002.300201.00.40.002	Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi	300	WP/WR	246.000.000,00
3002.300201.00.40.003	Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	12	bulan	210.000.000,00
3002.300201.00.40.004	Verifikasi BPHTB	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	2.000	SSPD BPHTB	85.000.000,00
3002.300201.00.40.005	Pemeriksaan pajak daerah	Terperiksanya Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	40	Lembar	145.000.000,00
3002.300201.00.40.006	Gebyar Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang menerima penghargaan	15	wp	78.000.000,00
<b>3002.41</b>	<b>Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah</b>				<b>711.650.000,00</b>
3002.300201.00.41.001	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah yang disusun	1	sisdur	65.000.000,00
3002.300201.00.41.002	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	12	bulan	75.000.000,00
3002.300201.00.41.003	Fasilitasi MP TP-TGR	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR	12	bulan	41.000.000,00
3002.300201.00.41.004	Fasilitasi pelaporan DAK	Jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK	12	bulan	56.650.000,00
		Jumlah laporan DAK per bidang	2	laporan/ bidang	
3002.300201.00.41.005	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pejabat penatausahaan dan atau pengelola keuangan yang meningkatkan pengetahuannya tentang pengelolaan keuangan daerah	300	orang	50.000.000,00
3002.300201.00.41.006	Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan	3.200	data	20.000.000,00
3002.300201.00.41.007	Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	Jumlah PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan daftar gajinya	3.000	orang	70.000.000,00
3002.300201.00.41.008	Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak	67	PD/Unit Kerja	234.000.000,00
3002.300201.00.41.009	Pendampingan transaksi non tunai	Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon /Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai	4	kali	100.000.000,00
					<b>11.404.513.000,00</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 ini disusun untuk dijadikan sebagai dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kota Pekalongan, serta dan sebagai panduan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020. Penyusunan Renja 2020 dilakukan setelah mempelajari visi, misi, dan program Pemerintah Kota Pekalongan sebagai muatan dan masukan dalam penyusunan visi, misi, strategi, kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan untuk satu tahun kedepan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan ini dapat menjadi sebagai acuan dan pedoman yang digunakan sebagai masukan dalam rangka penguatan peran serta dan partisipasi aktif dari semua stakeholders yang terkait didalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah serta menjadi dasar dan bahan untuk melakukan evaluasi dan guna penyusunan laporan pelaksanaan kinerja PD tahunan maupun lima tahunan.

Dengan demikian, diharapkan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah Kota Pekalongan di tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 ini masih memerlukan penyempurnaan dan saran dari semua pihak untuk perbaikannya.

Pekalongan, 16 September 2019

Kepala BKD Kota Pekalongan,



**Drs. R Doyo Budi W, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19631111 198902 1 005